

**PERAN INTELKAM DALAM MENCEGAH GANGGUAN KAMTIBMAS DI
WILAYAH HUKUM POLSEK POSO PESISIR UTARA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

OKTARIO DIONISIUS TANDAWUYA

NPM : 92011403161009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	6
B. Pengertian Kepolisian Sektor	7
C. Pengertian Intelkam Polri	12
D. Pengertian Pencegahan.....	13
E. Pengertian Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-sumber Penelitian.....	16
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	17
D. Metode Analisis Masalah	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Intelkam Polri Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas	19
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Tugas Intelkam Polsek Poso Pesisir Utara Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK SKRIPSI

Oktario Dionisius Tandawuya. 92011403161009. Peran Intelkam Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Poso Pesisir Utara. Di bimbing oleh Moh Irfan Latowale dan Albert Morangki..

Kata Kunci : Peran, Kepolisian Sektor

Salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan dan salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan pembangunan adalah adanya situasi kamtibmas yang kondusif, hanya situasi yang demikianlah yang dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan baik. Istilah kata pembangunan dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ibarat ikan dan air, artinya terlaksananya pembangunan pasti ditunjang dengan situasi kamtibmas yang baik. Dengan demikian situasi dan kondisi kamtibmas itu harus dapat terpelihara dengan baik, karena dengan terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif, sudah pasti masyarakat akan merasa tenang dan tenang melaksanakan berbagai aktivitas kegiatannya dengan baik, hal ini akan menjadi rangsangan bagi perkembangan pembangunan khususnya bagi daerah itu sendiri umumnya bagi negara Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah peran Intelkam Polri dalam mencegah gangguan Kamtibmas? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas intelkam Polsek Poso Pesisir Utara dalam mencegah gangguan kamtibmas ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Tugas Intelkam Polsek Poso Pesisir Utara Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas diantaranya adalah faktor wilayah yang begitu luas serta kendala jaringan komunikasi untuk mendukung sarana tugas dilapangan.



ABSTRACT

Oktario Dionisius Tandawuya. 92011403161009. The Role of Intelkam in Preventing Kamtibmas Disturbances in the Legal Area of the Poso Pesisir Utara Police Station. Supervised by Moh Irfan Latowale and Albert Morangki.

Keywords : Role, Sector Police

One of the conditions that cannot be ignored and one of the requirements needed in carrying out a development activity is the existence of a conducive public security situation, only such a situation can accompany the dynamics of community life well. The term development and the conditions of security and public order are like fish and water, meaning that the implementation of development must be supported by a good security and public order situation. Thus, the situation and condition of Kamtibmas must be well maintained, because with the maintenance of a conducive Kamtibmas situation, it is certain that the community will feel peaceful and calm to carry out various activities well, this will be a stimulus for the development of development, especially for the region itself, generally for the country of Indonesia.

The formulation of the problem in this study is 1. How is the role of the Police Intelkam in preventing Kamtibmas disturbances? 2. What are the obstacles faced in the implementation of the intelkam task of the Poso Pesisir Utara Police in preventing kamtibmas disturbances? This research uses normative juridical legal research, the approach used in this research is statute approach or statutory approach and conceptual approach.

Constraints Faced in the Implementation of Intelkam Tasks of Poso Pesisir Utara Police in Preventing Kamtibmas Disorders include the factor of such a large area and communication network constraints to support the means of field tasks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Salah satu keadaan yang tidak dapat diabaikan dan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan tindakan perbaikan adalah adanya keadaan pensiun yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah yang kondusif, keadaan seperti itu dapat berjalan dengan baik dalam unsur-unsur kehidupan daerah. . Istilah peningkatan dan kondisi keselamatan dan permintaan publik ibarat ikan dan air, yang menyiratkan bahwa pelaksanaan kemajuan akan didukung oleh keadaan pensiun dan permintaan yang dikelola pemerintah dengan baik. Oleh karena itu, kondisi dan kondisi keselamatan dan kebutuhan sosial harus sangat dijaga, karena dengan menjaga keamanan yang membantu dan kondisi pensiun yang didukung pemerintah, maka dipastikan daerah setempat akan terasa tenang dan tenteram dalam menyelesaikannya. pelaksanaan yang berbeda-beda dengan baik, hal ini akan menjadi dorongan untuk perbaikan, khususnya untuk kabupaten secara keseluruhan. untuk Indonesia.

Sebagai tanda dari keadaan saat ini dan yang dapat mendukung perbaikan, terdapat kondisi keamanan dan berjalannya hukum dan ketertiban yang sah. Dengan jaminan keamanan yang tinggi dan kepastian hukum ini, para investor akan datang untuk membuka berbagai kegiatan, dan kehadiran mereka akan meningkatkan laju kemajuan bagi daerah dan menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah lainnya untuk berlomba-lomba mencari peruntungan di dunia usaha dan bidang administrasi secara khusus. di Kawasan Poso Pesisir Utara.

Dari hasil observasi singkat di Polres Poso Pesisir Utara, penulis menggambarkan apa yang terjadi pada permintaan Publik Tanpa Henti dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari maraknya perampokan dan perilaku kasar di rumah. Data ini diperoleh dari Polsek Pesisir Utara yang diambil dari laporan masyarakat serta apa yang diketahui langsung oleh polisi di lapangan. Namun, diperkirakan masih banyak kejadian kriminal yang tidak dirinci oleh masyarakat pada umumnya, yang berarti jumlah keamanan publik dan kejengkelan permintaan mungkin akan jauh lebih besar.

Jika kita melihat akar masalahnya, sumber utama dampak meresahkan dalam keamanan dan permintaan berasal dari wilayah setempat, di mana kesusahan di suatu wilayah bergantung pada standar perilaku orang-orang yang memiliki wilayah tersebut. Dengan demikian, jika terjadi keributan di suatu ruang karena aktivitas manusia atau area setempat, maka perbaikannya harus kembali ke area lokal itu sendiri. Saat ini banyak sekali jejaring sosial yang lebih memilih untuk tidak menangani kehadiran kejengkelan tersebut karena berbagai faktor, rasa takut untuk terlibat, tidak ada atau tidak adanya rasa khawatir, keengganan dalam jangka waktu yang cukup lama yang akan mengganggu kehidupan individu dan berbagai pihak. Oleh karena itu, otoritas publik, dalam situasi ini polisi, terkadang bekerja sendiri tanpa bantuan. dari daerah setempat, padahal kerja polisi, khususnya di bidang kepolisian, memerlukan dukungan daerah, terutama data yang dapat mengungkap wawasan suatu permasalahan.

Demikian pula dengan Polres Poso Pesisir Utara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan, mengharuskan apa yang terjadi dalam mendukung organisasi pemerintah untuk mengakui perkembangan wilayah yang lebih

maju. Untuk memahami kebutuhan ini, diperlukan prosedur yang tepat, yang pada dasarnya mencakup bantuan dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus menyampaikan data kepada ahlinya jika mereka menemukan apa yang terjadi dapat membahayakan masyarakat.

Data publik inilah yang akan dikelola dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar setiap paparan situasi. Bagi masyarakat yang memberikan data, otoritas publik telah menjamin keamanan dengan memberikan pedoman hukum mengenai pengetahuan negara.

Kepolisian Sektor Poso Pesisir Utara merupakan salah satu jajaran terdepan Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah kesatuan Polres Poso. Kecamatan Poso Pesisir Utara berada di Kabupaten Poso dan memiliki 10 desa yang menjadi wilayah hukum, sedangkan karakteristik daerah wilayah hukum Polsek Poso Pesisir Utara didominasi oleh daerah pegunungan, dataran dan lautan sedangkan karakteristik penduduk bisa dikatakan Inonesia Mini karena diwilayah Hukum Polsek Pesisir Utara terdiri banyak suku, ras dan golongan sehingga dari karakteristik daerah dan penduduk inilah yang membuat wilayah hukum Polsek Pesisir Utara mempunyai trend kecenderungan meningkatnya angka gangguan kantibmas dari waktu kewaktu secara khusus ketika terjadi gangguan terorisme pada saat itu.

Untuk itu Polsek Poso Pesisir Utara harus dapat memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakatnya dan sangat relevan apabila dapat melaksanakan kebijakan pemolisian masyarakat mengedepankan fungsi intelijen Polri sebagai mata dan telinga pimpinan dan selalu memberikan peringatan dan deteksi dini dengan harapannya masyarakat di Kecamatan Poso Pesisir Utara dapat mengantisipasi setiap potensi ancaman keamanan

masyarakat dan dapat menanggulangi permasalahan yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat judul penelitian ini adalah Peran Intelkam Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Poso Pesisir Utara.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah peran Intelkam Polri dalam mencegah gangguan Kamtibmas?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas intelkam Polsek Poso Pesisir Utara dalam mencegah gangguan kamtibmas?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Intelkam Polri dalam mencegah gangguan Kamtibmas.
2. Untuk mengetahui apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas intelkam Polsek Poso Pesisir Utara dalam mencegah gangguan kamtibmas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum sehingga masyarakat dapat memahami tentang mengetahui peran Intelkam Polri dalam mencegah gangguan Kamtibmas.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas intelkam Polsek Poso Pesisir Utara dalam mencegah gangguan kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. Kadarmanta, 2007. Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2019, Kepolisian dan terorisme, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta: Bina Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002 Memahami intelijen, Pradnya Paramita Jakarta.
- Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan hukum, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, Polri dan keamanan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014, Kontra intelijen, Alfabeta, Bandung.
- Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah